

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Reformasi yang telah terjadi membuat perubahan politik dan administrasi, salah satu bentuk reformasi tersebut adalah perubahan bentuk pemerintahan yang sentralisasi menjadi struktur yang terdesentralisasi dengan diberlakukan Undang-undang No. 22 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah. Tujuan ekonomi yang hendak dicapai melalui desentralisasi adalah mewujudkan kesejahteraan melalui penyediaan pelayanan publik yang lebih merata dan memperpendek jarak antara penyedia layanan publik dan masyarakat lokal (Harianto dan Adi,2007).

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004, otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah berlaku efektif mulai 1 Januari 2001 mempunyai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yang menitikberatkan pada daerah kabupaten dan kota ditandai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari Pemerintah pusat ke Pemerintah daerah yang bersangkutan. Hal tersebut menegaskan bahwa Pemda memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumberdaya yang dimiliki untuk belanja-belanja daerah dengan menganut

asas kepatuhan, kebutuhan, dan kemampuan daerah yang tercantum dalam anggaran daerah (Harianto dan Adi,2007).

Anggaran sektor publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan rencana keuangan tahunan Pemda yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang merupakan pedoman bagi Pemda dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam masa satu tahun anggaran. APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (Harianto dan Adi,2007).

Sejak diberlakukan otonomi daerah pembangunan dan perekonomian daerah menjadi tanggung jawab daerah dalam mangaturnya. Sebagaimana dalam UU Nomor 22 tahun 1999 Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan paraturan perundang-undangan. Dengan demikian,pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui kebutuhan dan kondisi daerah serta keinginan masyarakat didaerah masing-masing dibandingkan dengan pemerintah pusat.

Dalam rangka otonomi daerah yang lebih luas kepada daerah terutama di bidang keuangan daerah diberi kewenangan untuk dapat mengisi sumber dana yang ada sesuai dengan potensi dan keadaan daerah masing-masing sehingga nantinya dapat meningkatkan pendapatannya untuk

kepentingan pembiayaan rumah tangganya sendiri. Kemampuan administrasi pemerintah daerah sangat berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pendapatan, alokasi tanggung jawab untuk melaksanakan pengenaan pajak dan pungutan pajak tergantung pendapatan asli daerah, tingkat kemampuan yang dibutuhkan dan tersedianya tenaga ditingkatkan daerah. Tenaga terampil mungkin terbatas dan sulit bagi pemerintah daerah mempekerjakannya, meskipun ada alternatif seperti menyewa konsultan atau bantuan tenaga dari suatu instansi lain.(Arsyad, 2000:10)

Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta Tahun 2013 diproyeksi sebesar 6,11%, kontribusi terbesar masih didominasi oleh sektor perdagangan, hotel & restoran, industri pengolahan dan jasa. Sektor keuangan,persewaan dan Jasa Perusahaan,dan sektor sekunder dan tersier tersebut menjadi penggerak pertumbuhan PDB Kota Surakarta. Pertumbuhan kedua sektor tersebut meningkat seiring dengan berhasilnya pencitraan *brand image* Kota Surakarta sebagai Kota yang skala regional, nasional dan internasional yang memberi akselerasi pada pertumbuhan dan kontribusi sektor basis. Kondisi perekonomian Kota Surakarta pada tahun 2012 dan 2013 optimis tumbuh, seiring dengan kuatnya pasar domestik dalam memicu pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta diperkirakan akan tumbuh sebesar 6,07% tahun 2012 dan 6,11% pada tahun 2013. Sedangkan proyeksi pertumbuhan nilai PDRB atas Dasar Harga Berlaku dan harga konstan tahun 2012-2013, masing-masing tumbuh sebesar 9,25% dan 6,06% untuk tahun 2011-2012 dan 11,06% dan 6,11% untuk tahun 2012-2013.

Sedangkan inflasi di Kota Surakarta pada Tahun 2010 sebesar 6,65 % dan Tahun 2011 sebesar 2,35 % (Bappeda Surakarta).

Penerimaan pendapatan daerah berkaitan erat dengan kondisi ekonomi yang berlaku di Kota Surakarta, seperti pajak daerah, produk domestik regional bruto (PDRB), laju inflasi, dan jumlah penduduk miskin inilah yang akan mempengaruhi peningkatan pembiayaan daerah Kota Surakarta. Maka penulis tertarik untuk membuat skripsi yang berjudul “ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) TERHADAP MENINGKATNYA BELANJA DAERAH DI KOTA SURAKARTA TAHUN 1990-2011”

B. Perumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dibuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pajak daerah terhadap Belanja daerah di kota Surakarta?
2. Bagaimana pengaruh Dana alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja daerah kota Surakarta?
3. Bagaimana pengaruh PDRB perkapita terhadap Belanja daerah di kota Surakarta?
4. Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap Belanja daerah di kota Surakarta?

5. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap Belanja daerah di kota Surakarta?
6. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap Belanja daerah di kota Surakarta?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap belanja daerah di kota Surakarta.
2. Untuk mengetahui pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja daerah di kota Surakarta.
3. Untuk mengetahui pengaruh PDRB perkapita terhadap belanja daerah di kota Surakarta.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengangguran terhadap belanja daerah di kota Surakarta.
5. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap belanja daerah di kota Surakarta.
6. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi terhadap belanja daerah di kota Surakarta.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca, khususnya yang berminat untuk mengetahui lebih jauh tentang belanja daerah.
2. Sebagai masukan dan informasi bagi Pemerintah Daerah kota Surakarta, sekaligus dapat menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan di masa yang akan datang dalam hal pengelolaan belanja daerah.
3. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder (*time series*) dalam kurun waktu 1990-2011 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) kota Surakarta serta sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Data yang digunakan yaitu *time series* selama kurun waktu 1990-2010. Adapun data yang digunakan meliputi data Belanja Daerah (Y), Pajak Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2), PDRB Perkapita (X_3), Pengangguran (X_4), Tingkat pendidikan (X_5) dan Inflasi (X_6).

2. Definisi Operasional dan Pengukuran variabel

a. Belanja Daerah (Y)

Belanja daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan Pemda yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar

pengelolaan keuangan daerah yang merupakan pedoman bagi Pemda dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam masa satu tahun anggaran.

b. Pajak Daerah (X_1)

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau kelompok tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

c. Dana Alokasi Umum (X_2)

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dari pengertian yang diambil dari Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa DAU merupakan sarana untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah dan di sisi lain juga memberikan sumber pembiayaan daerah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa DAU lebih diprioritaskan untuk daerah yang mempunyai kapasitas fiskal yang rendah.

d. PDRB Perkapita (X_3)

PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB dan dan PDRB per kapita atau persatu orang penduduk dan

PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita.

e. Pengangguran (X_4)

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Pengangguran merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik yang belum pernah bekerja maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan atau mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan mereka yang putus asa untuk memperoleh pekerjaan.

f. Tingkat Pendidikan (X_5)

Tingkat pendidikan merupakan banyaknya penduduk 5 Tahun ke atas menurut tingkat pendidikan di Kota Surakarta yang mempunyai tingkat pendidikan tamatan akademi atau universitas.

g. Inflasi (INF)

Menurut Bank Indonesia (2007), inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya berbagai kendala atau kekakuan struktural (*structural rigidities*) yang menyebabkan penawaran dalam perekonomian menjadi kurang atau tidak adanya responsif terhadap permintaan yang meningkat.

3. Metode dan Alat Analisis

a. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi merupakan studi dalam menjelaskan dan mengevaluasi hubungan antara suatu peubah bebas (*independent variable*) dengan satu peubah tak bebas (*dependent variable*) dengan tujuan untuk mengestimasi atau meramalkan nilai peubah tak bebas didasarkan pada nilai peubah bebas yang diketahui (Gujarati, 1999).

Metode regresi linier berganda dapat digunakan untuk melihat pengaruh beberapa peubah penjelas atau peubah bebas terhadap satu peubah tak bebas. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk melihat pengaruh variabel pajak daerah, dana alokasi umum dan PDRB perkapita, jumlah penduduk miskin, inflasi, terhadap meningkatnya belanja daerah. Metode ini digunakan karena terdapat data yang memiliki variabel yang banyak (*multivariate*) untuk mengetahui pengaruh peningkatan belanja daerah.

Untuk mengatakan kuat tidaknya hubungan linier antara peubah penjelas dan peubah tak bebas dapat diukur dari koefisien korelasi (*coefficient correlation*) atau R, dan untuk melihat besarnya sumbangan (pengaruh) dari peubah bebas terhadap perubahan peubah tak bebas dapat dilihat dari koefisien determinasi (*coefficient of determination*) atau R².

Variabel *dummy* adalah variabel yang menjelaskan ada atau tidak adanya kualitas dengan membentuk variabel buatan yang menganbil nilai 1 atau 0 (Gujarati,1999).

Pengaruh peubah bebas terhadap total penerimaan belanja daerah dapat diketahui dari persamaan regresi berikut ini :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \mu$$

Keterangan :

Y : Belanja Daerah

X₁ : Pajak Daerah

X₂ : Dana Alokasi Umum

X₃ : PDRB Perkapita

X₄ : Pengangguran

X₅ : Tingkat Pendidikan

X₆ : Inflasi

β_0 : Konstanta Intersep

β_1 : Koefisien regresi pajak daerah

β_2 : Koefisien regresi Dana Alokasi Umum

β_3 : Koefisien regresi PDRB

β_4 : Koefisiensi Pengangguran

β_4 : Koefisiensi Tingkat Pendidikan

β_5 : Koefisiensi Inflasi

Ut : Variabel penganggu

Parameter yang digunakan dalam model diatas dapat ditaksir dengan metode *ordinary least squares* (OLS), dengan syarat asumsi-asumsi model regresi linier berganda ini terpenuhi (Gujarati, 1999)

b. Penyusunan Persamaan Regresi

Adapun langkah-langkah pokok dalam prosedur ini adalah sebagai berikut:

1. Menghitung persamaan regresi yang mengandung semua peubah bebas.
2. Menghitung nilai-F parsial untuk setiap peubah bebas, seolah-olah nilai tersebut merupakan peubah terakhir yang dimasukkan ke dalam persamaan regresi.
3. Membandingkan nilai-F parsial terendah, misalnya FL, dengan nilai-F bertaraf nyata tertentu dari tabel, misalnya F0.
 - a. jika $FL < F_0$, buang peubah ZL, yang menghasilkan FL, dari persamaan regresi dan kemudian hitung kembali persamaan regresi tanpa menyertakan peubah tersebut, kembali kelangkah (2)
 - b. jika $FL > F_0$, ambillah persamaan regresi itu.(Gujarati, 1999)

c. Asumsi-Asumsi Regresi Linier Berganda

Penggunaan metode kuadrat terkecil biasa (OLS) dapat dilakukan apabila asumsi regresi linier klasik terpenuhi. Beberapa asumsi yang harus dipenuhi oleh persamaan regresi linier berganda ini adalah sebagai berikut:

1. Normalitas, regresi linier klasik mengansumsikan bahwa tiap i ε mengikuti distribusi normal $\varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$.
2. Non autokorelasi antar sisaan, berarti $\text{cov}(\varepsilon_i, \varepsilon_j) = 0$, dimana $i \neq j$
3. Homokedastisitas $\text{var}(\varepsilon_i) = s^2$ untuk setiap i , $i = 1, 2, \dots, n$ yang artinya varians dari semua sisaan adalah konstan atau homokedastik.
4. Tidak terjadi multikolinieritas yang artinya tidak terdapat hubungan linier yang sempurna atau pasti di antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan model regresi.

F. Sistematika penulisan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan memudahkan dalam pemahaman skripsi, maka disusunlah sistematika penulisan dalam penelitian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar belakang
- B. Perumusan masalah
- C. Tujuan penelitian
- D. Manfaat penelitian
- E. Metode penelitian
- F. Sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Teori Pengeluaran Pemerintah
- B. Teori Belanja Daerah

- C. Teori Pajak
- D. Dana Alokasi Umum (DAU)
- E. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
- F. Penduduk Miskin
- G. Penelitian Terdahulu
- H. Hipotesis

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Objek Penelitian
- B. Jenis dan Sumber Data
- C. Definisi Operasional Variabel
- D. Metode Analisis Data
- E. Asumsi-Asumsi Regresi Linear Berganda

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Kota Surakarta
- B. Hasil dan Pembahasan
- C. Interpretasi Ekonomi

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

Daftar Pustaka

Lampiran